BAB II

TINJAUAN UMUM PT. POS INDONESIA

2.1. Sejarah Perusahaan PT. Pos Indonesia Dan Museum Pos Indonesia

Berawal dari gagasan, berkembang seiring kebutuhan, gagasan untuk memperlancar alur surat-menyurat selama era kolonial Belanda telah diwujudkan oleh gubernur Jendral G.W.Baron van Imhoff dengan mendirikan Kantor Pos yang pertama di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746. Peranan kantor pos semakin penting dan berkembang setelah penemuan tekhnologi Telegrap dan Telepon, sehingga dibentuk Jawatan Pos Telegrap dan Telepon (Jawatan PTT) pada tahun 1907.

Jawatan PTT merupakan bagian dari departemen perusahaan-perusahaan pemerintah (*Departement van Gouvermementsbedrijven*) dan dikelola berdasarkan Undang-undang Perusahaan Negara Hindia Belanda (*Indische Bedrijvenwet* = *IBW*) Seiring dengan tibanya Jepang yang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, Jawatan PTT dibagi menurut struktur organisasi pemerintah militer Jepang sehingga ada Jawatan PTT Sumatra, Jawatan PTT Jawa, dan Jawatan PTT Sulawesi.

Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambil alihan kantor pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari pemerintah militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Bhakti PTT dan kemudian menjadi Hari Bhakti Parpostel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 1960, Jawatan PTT dianggap memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut untuk menjadi perusahaan negara. Dengan demikian Jawatan PTT diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan peraturan pemerintah No. 240 Tahun 1961. Agar diperoleh kebebasan bergerak yang lebih luas dalam mengembagkan usaha, PN Postel dipecah menjadi dua badan usaha masing-masing PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PP No. 30 Tahun 1965.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun 1969, status badan usaha negara dikelompokkan menjadi tiga status yaitu:

- Perusahaan Jawatan (Perjan)
- Perusahaan Umum (Perum)
- Perusahaan Perseroan (Persero)

Status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 9 Tahun 1978. Sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam iklim usaha, status sebagai perum disempurnakan khususnya yang menyangkut tata cara pembinaan dan pengawasan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1984.

Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan, diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis agar mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) dilaksanakan berdasarkan PP No 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, dan perubahan tersebut secara efektif mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 1995.

Museum Pos Indonesia berdiri pada tahun 1931 dengan nama Museum PTT (Pos, Telepon, Telegraph) bertempat di kantor pusat Pos Indonesia Jl.Cilaki 73 Bandung 40115. Menyadari arti

Pentingnya peran dan fungsi museum sebagai sarana pendidikan, informasi dan rekreasi untuk generasi muda pada masa sekarang maupun yang akan datang, maka dilakukan upaya renovasi dengan tujuan agar dapat memelihara dan melestarikan kekayaan warisan budaya dalam pelayanan pos. Bertepatan dengan hari bhakti postel Tanggal 27 september 1983 hasil renovasi tersebut di resmikan oleh Menteri Pariwisata POS dan Telekomunikasi dengan nama Museum Pos dan Giro. Seiring dengan perubahan status perusahaan dari Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi PT.Pos Indonesia pada tanggal 20 juni 1995. Maka museum tersebut berganti nama menjadi Museum Pos Indonesia.

2.2. Profil Perusahaan

Museum Pos Indonesia bertempat di sebelah kantor pusat PT.Pos Indonesia yaitu di jalan cilaki No.73 Bandung Jawa Barat. Kode pos Musem Pos Indonesia 40115. Telepon (022) 4206195 pes.153 *E-mail* Museum Pos museum@posindonesia.go.id.

2.2.1. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia

a. Visi

Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan. Dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang profesional sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai konsep bisnis yang sehat.

b. Misi

1. Menyediakan sarana komunikasi yang andal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.

2. Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimum bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan mitra kerja.
3. PT. Pos Indonesia mengemban misi sosial yang sudah lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, karena ditunjang oleh adanya jaringan pelayanan pos yang mencapai daerah-daerah terpencil diseluruh tanah air.

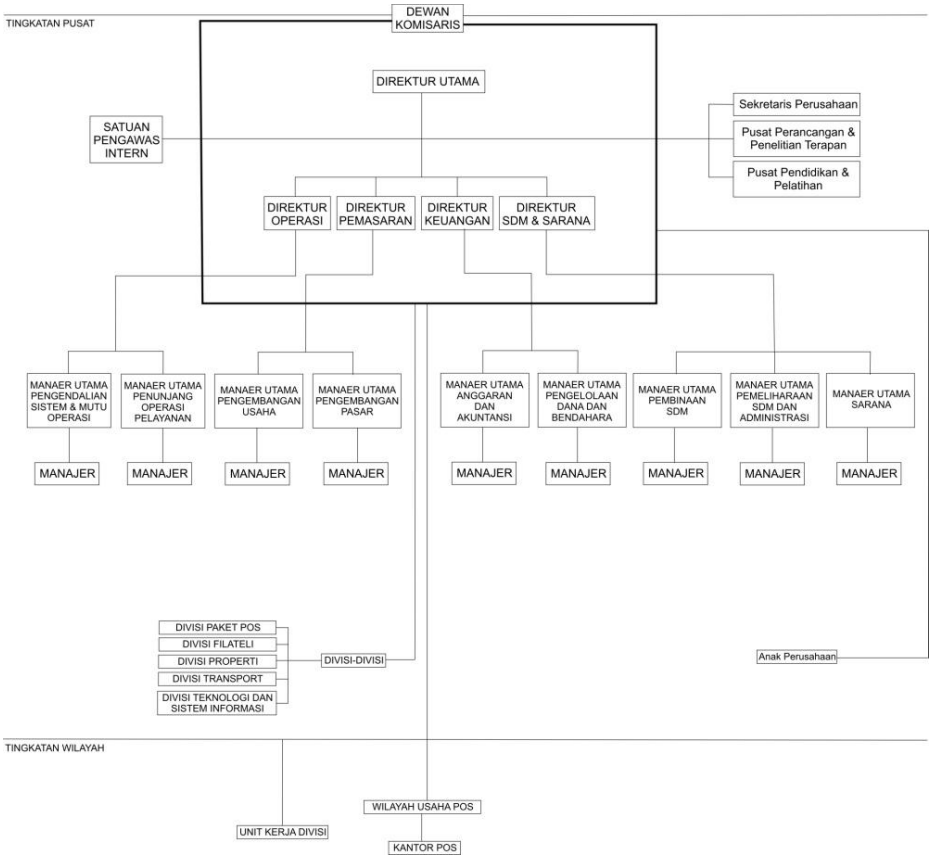
2.2.2 Komitmen PT. Pos Indonesia

Memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa pos merupakan komitmen PT. Pos Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, PT. Pos Indonesia telah menetapkan prioritas operasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya melalui beberapa program kerja, yaitu :

- Modernisasi proses produksi dan administrasi, integrasi jaringan telekomunikasi dalam peningkatan mutu dan ragam layanan.
- Intensifikasi penggarapan layanan keuangan sebagai salah satu usaha andalan *(prime business)*.
- Pembinaan sumberdaya manusia yang profesional dan terampil untuk mendukung tercapainya mutu layanan yang tinggi.

2.2.3 Struktur Organisasi Tingkat Pusat PT. Pos Indonesia (Persero)

Struktur Organisasi Tingkat Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel II.1 Bagan Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia

Tingkatan Struktur Organisasi Pos ini terdiri dari Perusahaan Umum dan Anak Perusahan. Perusahaan Umum ini dipimpin oleh Direktur Utama dengan bawahan direktur, manajer utama dan manajer. Sedangkan Untuk Anak Perusahaan terbagi dalam Dewan Komisaris sebagai pimpinan yang mengatur bagian divisi-divisi. Divisi-divisi tersebut terbagi dalam 5 divisi, salah satunya Museum Pos terdapat dalam divisi properti.